**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

**Hernawati**

**Fakultas Ekonimi dan Bisnis**

**Universtis Mulawarman**

**hernawati.tr@gmail.com**

***ABSTRACT***

*The Influence factors the of Good Corporate Governance on Ernings Quality in Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. Supervised by : Mrs. Anis Rachma Utary and Ms. Yoremia Lestari br. Ginting.*

This study examined the influence of the audit committee, the independent Commissioner, institutional and managerial ownership ownership of the quality of earnings*. The purpose of the research was to find empirical evidence of (a) influence to the quality of the audit committee, (b) the influence of the independent Commissioner against the quality, (c) the influence of institutional ownership of the quality of earnings, (d) the influence managerial ownership of the quality of earnings. The purpose of the research was to find empirical evidence of (a) influence to the quality of the audit committee, (b) the influence of the independent Commissioner against the quality earnings, (c) the influence of institutional ownership of the quality of earnings, (d) the influence managerial ownership of the quality of earnings.*

*The sample in this research is the Mining companies listed in Indonesia Stock exchange (IDX) in period in 2011-2015.The Sample were approximately 5 companies with 25 observations. Analysis of data using simple linear reggression analysis.*

*The results of the study with linear regression analysis showed the (a) audit committee has an impact on the quality of earnings. The results of this study indicate that the audit committee is able to improve the quality of earnings. the audit Committee also judged able to have taken small decisions in keeping the quality of the company's financial statements performed by the management.(b) The independent Commissioner has no influence on the quality of the earnings. This is because the independent Commissioner has yet to fully carry out its duties and responsibilities collectively to supervise and provide advice to the Board of Directors. (c) The institusuional ownership has no effect on the quality of the earnings. This suggests that the higher by share ownership, by institutional parties, then the quality of the profit of the company will decrease. (d) The managerial ownership has effect on the quality of the earnings. This causes that the greater managerial ownership in the company management tend to trying to improve its performance. This means that the higher the shares by management, then the profit is getting quality.*

***Keywords : Audit Commite, Independen Commissioner, Institusional ownership, management ownership and earning quality.***

**ABSTRAK**

Pengaruh Faktor-Faktor *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas laba pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing oleh Ibu Anis Rachma Utary dan Ibu Yoremia Lestari br. Ginting.

Studi ini meneliti pengaruh komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris tentang (a) pengaruh komite audit terhadap kualitas laba, (b) pengaruh komisaris independen terhadap kualitas laba, (c) pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba dan (d) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitias laba.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2011-2015. Sampel penelitian sebanyak 5 perusahaan dengan 25 observasi melalu metode *Purposive* *Sampling.* Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear menunjukkan bahwa (a) komite audit mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit mampu meningkat kualitas laba. Komite audit juga dinilai mampu mengambil keputusan dalam menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. (b) Komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini disebabkan karena komisaris independen belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. (c) Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi oleh kepemilikan saham, oleh pihak instiitusional, maka kualitas laba dari perusahaan akan menurun. (d) Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini menyebabkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya. Artinya semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka laba semakin berkualitas.

**Kata Kunci** : Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Laba.

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Selain itu, perusahaan juga menginginkan laba dengan kualitas yang baik berlangsung secara terus menerus. Kualitas laba dapat dilihat dari manfaat bagi pengambilan keputusan bisnis para pengguna laporan keuangan (Boediono 2005). Dengan demikian diharapkan pihak menajemen perusahaan mengelola dengan baik kebijakan akuntabilitasnya agar laba yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga aktivitas perusahaan dapat berkelanjutan atau berkesinambungan.

Untuk menjadikan informasi yang berguna, laba harus memiliki tingkat kualitas yang tinggi, selain itu juga memiliki kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang dan bersifat variabilitas. Salah satu indikator laba yang berkualitas adalah laba yang merujuk pada kemungkinan adanya laba perusahaan dalam periode sekarang akan terjadi lagi pada periode yang akan mendatang (Siallagan dan Mechfoedz, 2006). Laporan keuangan sebagai produk akuntansi, merupakan salah satu sarana bagi prinsipal (pemilik sumber daya) untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan agen (manajemen). Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggung jawaban pihak manajemen. Mekanisme *Corporate Governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba (Boediono, 2005).

Informasi tentang laba *(earnings)* mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditur, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba *(sustainable earnings)* di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya (Wijayanti, 2006). Laba tahunan memiliki kandungan informasi, apabila pengumuman laba akan menyebabkan perubahan reaksi investor terhadap distribusi aliran kas di masa yang akan datang, yang akan menyebabkan perubahan harga saham disekitar tanggal pengumuman diharapkan lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan harga saham diluar tanggal pengumuman.

Kualitas laba adalah laba dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam bidang keuangan yang sebenarnya. Menurut Boediono (2005) laba yang berkualitas adalah laba yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan Kualitas laba menurut (Zdulhiyanov, 2015) adalah kemampuan laba dalam laporan keuangan untuk menjelaskan kondisi laba perusahaan yang sesungguhnya sekaligus digunakan dalam memprediksi laba masa depan. Dimana laba sangat berperan penting untuk masa depan perusahaan serta menilai kinerja suatu perusahaan, selain itu laba juga penting sebagai informasi bagi investor dalam investasi oleh karena itu perusahaan harus mempunyai kemampuan yang baik untuk menjamin masa depan perusahaan. sedangkan Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah di capai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keauangan adalah suatu analisis yang di lakukan untuk sejauh mana perusahaan telah melaksnakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Rendahanya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para pengguna seperti investor dan kreditor. Salah satunya adalah kurang adanya memperhatikan penerapan konsep pada tata kelola perusahaan yang baik sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan dapat diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pengguna laporan. Jika laba seperti ini gunakan oleh investor untuk membentuk nilai perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (Boediono, 2005).

**TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Khomsiyah (2003 : 202) *Corporate* *Governance* merupakan salah satu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakehoders.* Pelaksanaan *Good* *Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Menurut Hery (2010:11) Good corporate adalah “ Sepertangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegag saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak hak dan kewajiban mereka”.

Sedangkan menurut Sutedi (2011) mendefinisikan Good Corporate Governanace adalah sebagai suatu proses dalam struktur yang digunakan oleh organ perusahaan seperti Direktur, Manajer, Pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu, untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilia-nilia etika yang berlaku secara umum. Pengertian Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah “Tata Kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governace)*, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

*Good Corporate Governance* mempunyai definisi yang beragam dan sangat luas, maka berdasarkan dengan definisi yang beragam diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapannya juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *Good Corporate Governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang menerapkan *Good Corporate Governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, peraturan No.IX.1.5, Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yaitu:

**Komite Audit**

1. Pengertian Komite audit

Komite audit adalah komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Pembentukan Komite audit

a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit;

b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit;

c. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

d. Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Pedoman Pembentukan Komite Audit

a. Struktur Komite audit

1). Anggota Komite Audit dianggkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

2). Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit lebih dari satu orang maka satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

b. Persyaratan Keaggotaan Komite Audit

1). Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar beklakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik,

2). Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

3). Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

Daniri (2006) menyebutkan sejak direkomendasikan *Good Gorporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate* *governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

**Komisaris Independen**

Menurut Emirzon (2006) komisaris independen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi. Pembentukan komisaris independen didasarkan oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Terbuka. Anggota dari dewan komisaris indpenden tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi maupun para pemegang saham yang kuat karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen (Emirzon:2006).

Menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, peraturan No.IX.1.5 juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tata kelola yang baik di dalam perusahaan. Manfaatnya akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *Good Corporate* *Governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan

atau mengungkapkan praktek *Good Corporate Governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan menajemen serta memberikan nasihat kepada menajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Emirzon (2006) komisaris independen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi. Pembentukan komisaris independen didasarkan oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Terbuka. Anggota dari dewan komisaris indpenden tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi maupun para pemegang saham yang kuat karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen (Emirzon:2006).

Menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, peraturan No.IX.1.5 juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tata kelola yang baik di dalam perusahaan. Manfaatnya akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *Good Corporate* *Governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan

atau mengungkapkan praktek *Good Corporate Governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan menajemen serta memberikan nasihat kepada menajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik.

**Kepemilikan Insitusional**

Kepemilikan Insitusioanal merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dengan melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusional dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kepentingan terhadap akrualisasi sesuai kepentingan manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan.

Hal ini karena biasanya institusi mempunyai hak yang cukup besar sehingga mengambil proksi yang cukup besar pula atas kepemilikan saham suatu perusahaan. Peranan pemilik institusi dalam *Good Corporate Governance* adalah (a) mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis di mana mereka menanamkan dananya, (b) sebagai sumber informasi perusahaan, dan (c) memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**4 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal (Melinda, 2008).

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan sahammanajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yangmeningkatkan laba yang dilaporkan yang sebenarnya tidak mencerminkankeadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005).Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai pemilik (Jensen danMeckling, 1976). Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen padaperusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentinganpemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

**Kualitas Laba**

Laba pada dasarnya merupakan selisih antara pendapatan dan beban, dimana jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu. Laba merupakan hal yang sangat penting dalam sebagai suatu dasar pengambilan keputusan berbagai kepentingan, antara lain dalam hal pengenaan pajak, investasi, atau kinerja perusahaan. Informasi mengenai laba merupakan informasi yang sangat penting, bagi berbagai pihak, internal maupun eksternal perusahaan, seperti pihak manajemen, pihak perusahaan, pihak fiskus, pemerintah, dan sebagainya. Definisi tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Belkaoui (2007:226), bahwa laba adalah hal yang mendasar dan penting dari laporan keuagan dan memiliki banyak kegunaan di berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai dasar perpajakan, penentu dari kebijakan pembayaran deviden, panduan dalam melakukan investasi dan pengambilan keputusan, dan satu elemen dalam peramalan.

Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, tentunya perusahaan membutuhkan informasi laba yang berkualitas, agar keputusan-keputusan yang ditetapkan dapat berguna bagi kepentingan perusahaan. Menurut Godfrey (2010) Mendefiniskan bahwa kualitas laba merupakan suatu alat apakah laba yang dilaporkan perusahaan dalam setiap periodenya mencerminkan kualitas laba yang dapat diandalkan atau tidak.

Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba

yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba dinilai tinggi jika mendekati atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah jika dalam penyajian laba tidak sesuai dengan laba sebenarnya sehingga informasi yang didapat dari laporan laba menjadi bias dan dampaknya menyesatkan kreditor dan investor dalam pengambilan keputusan (Rinawati, 2011).

Kualitas laba merupakan kemampuan laba dalam laporan keuangan untuk menjelaskan kondisi laba perusahaan yang sesungguhnya sekaligus digunakan dalam memprediksi laba masa depan. Laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang mendapat banyak perhatian dan sering digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, apabila laba yang disajikan tidak dapat diandalkan maka keputusan pengguna yang didasarkan pada informasi dalam laporan keuangan juga tidak akan tepat (Zdulhiyanov, 2015).

**Pengukuran Kualitas Laba**

Terdapat beberapa ukuran kualitas laba yang sering digunakan dalam penelitian, salah satunya adalah metode pengukuran yang digunakan oleh Givoly *et al.*(2010)*.* Metode pengukuran yang digunakan tersebut, antara lain :

1. Persistensi akrual

Kualitas laba didasarkan pada perbedaan relatif persistensi akrual terhadap arus kas (Givoly et al. 2010). Persistensi diukur dengan menggunakan regresi sebagai berikut:

OIi,t+1 = α + β1CFi,t + β2ACCRi,t + εi,t

Dimana :

OI = *Operating income* (pendapatan operasi) setelah dikurangi depresiasi.

CF = *Cash flow* (arus kas) operasi yang dihitung dari OI dikurangi ACCR.

ACCR = *Accrual component of earnings,* dihitung dari perubahan NOA *(net operating asset)* tahun t-1 terhadap t.

Nama perusahaan ditunjukkan oleh I dan t menunjukkan tahun. Seluruh variabel distandarisasi oleh NOAt-1 dan kontribusi tambahan akrual ditentukan oleh besarnya signifikansi β2.

2. Estimasi kesalahan dalam proses akrual

Akrual memberikan informasi tentang arus kas masa yang akan datang. Untuk meningkatkan bahwa proses akrual bebas dari kesalahan estimasi, akrual dan laba akan direpresentasi dengan arus kas masa yang akan datang. Givoly *et al*. (2010), menggunakan ukuran akrual sebagaimana yang digunakan oleh Dechow dan Dichey (2002:35-39) dan telah dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis *et al*.(2005) yang didasarkan pada model *varian residual* berikut ini:

TCAi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t-1 + β4ΔRevi,t + β5ΔPPEi,t + εi,t

Dimana :

TCA = *Total current accruals*

CFO = *Cash flow from operations* (pendapatan dari operasi utama dikurangi total akrual), dimana total akrual adalah TCA dikurangi biaya depresiasi dan amortisasi.

ΔRev =Perubahan pendapatan dari tahun t-1 terhadap t

PPE = Keseimbangan antara *property, plant* dan *equipment* (atas dasar PPE bruto)

Seluruh variabel diregres dan diskala dengan rata-rata *total assets* dalam tahun t. Diregres juga secara *cross sectional* untuk tiap industri dengan sedikitnya 20 perusahaan tiap tahunnya. Ukuran kualitas kedua adalah variabilitas (dinilai dengan standar deviasi) residual dari regresi. Semakin tinggi variabilitas hubungan antara laba dan arus kas, maka semakin rendah kualitas akrual dan semakin rendah pula kualitas labanya. Kualitas akrual didefinisikan juga sebagai rasio standar deviasi residual dari regresi terhadap *standard deviation total current accruals.*

3. Ketiadaan manajemen laba

Menurut Givoly *et al*. (2010) mengidentifikasi manajemen laba dengan menggunakan akrual yang diharapkan atau *non discretionary accruals* modifikasi model Jones sebagai berikut:

TACCi,t = α1\*[1/TAi,t-1] + α2\*[(ΔREVi,t - ΔTRi,t) / TAi,t-1] + α3\*[PPEi,t /TAi,t-1] + εi,t

Dimana :

TACC = Total akrual yakni perbedaan antara pendapatan operasi dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tidak termasuk pos-pos luar biasa *(extraordinary items)* dan operasi yang dihentikan.

TA = Total aset awal tahun

ΔRev = Perubahan penjualan

PPE = Tingkat *property, plant* dan *equipment* kotor

ΔTR = Perubahan dalam piutang dagang *(trade receivable)*

4. Konservatisme

Givoly *et al*. (2010) menggunakan ukuran konservatisme sebagaimana yang digunakan oleh Ball and Shivakumar, yaitu mendeskripsikan perbedaan ketepatan waktu dalam mengakui keuntungan dan kerugian berdasarkan pada hubungan antara akrual dan arus kas sebagai berikut:

ACCi,t = α0 + α1 \* DCFOi,t + α2 \* CFOi,t + α3 \* DCFOi,t \* CFOi,t + εi,t-1

Dimana :

ACC = Total akrual dalam tahun t

CFO = Arus kas operasi dalam tahun t

DCFO = Variabel dummy *(dummy variable).* 1 jika CFO negatif dan 0 jika CFO positif. Jika α2 < 0 berarti tidak konservatif dan jika α3 > 0 berarti konservatif.

Adapun rumus untuk menghitung tingkat kualitas laba dengan *discretionary accruals,* ialah :

a. Menghitung total akrual dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi.

**TACit = Niit – CFOit**

Keterangan:

**TACit** = Total akrual perusahaan i pada tahun t

**Niit** = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

**CFOit** = Kas dari operasi perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*):

**TACit/TAit-1 = α1(1/TAit-1) + α2(ΔREVit / TAit-1 ) + α3(PPEit / TAit-1) + et**

Keterangan:

TACit  : total *accruals* perusahaan i pada periode t

TAit-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REVit : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPEit : aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

α1, α2, α3 : Koefisien regresi persamaan TACt/TAt-1

et : *Error term* tahun t

c. Menghitung *non discretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut:

**NDACit = a1(1/TAit-1) + a2(ΔREVit – ΔRECit / TAit-1) + a3(PPEit / TAit-1)**

NDACit : *non discretionary* accruals perusaan i pada tahun t

TAit-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REVit : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

RECit : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPEit : aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

a1, a2, a3 : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan (TACt/TAt-1)

d. Menghitung *Discretionary Accruals*

**DACit : (TACit / TAit-1) – NDACit**

*(Sumber: Paulus, 2012)*

Keterangan:

DACt : *discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t

TACit  : total *accruals* perusahaan i pada periode t

TAit-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

NDACit : *non discretionary* accruals perusaan i pada tahun t

**METODE PENDELITIAN**

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance*, yaitu terdapat empat variabel independen, yakni komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laba.

Menurut Sugiyono (2010: 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2011-2015 yang berjumlah 51 perusahaan.

Pertimbangan atau kriteria bagi perusahaan yang akan dipilih dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melaporkan secara publik laporan keuangan dalam tahun fiskal per 31 Desember dari tahun 2011-2015
2. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
3. Perusahaan yang menjadi objek penelitian harus memiliki komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial
4. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami rugi selama periode penelitian.

Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan tersebut, disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**Penyaringan Sampel Penelitian berdasarkan Metode *Purposive Sampling***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Keterangan** | **Jumlah** |
| 1. | Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI | 51 |
| 2. | Perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah | (16) |
|  |  | 35 |
| 3 | Perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan informasi kepemilikan manajerial secara lengkap periode 2011-2015 | (18) |
|  |  | 17 |
| 4. | Perusahaan pertambangan yang mengalami rugi selama periode penelitian | (12) |
|  | **Jumlah perusahaan** | 5 |
|  | **Tahun amatan** | 5 |
|  | **Jumlah Sampel Penelitian** | 25 |

**Sumber :www.Idx.co.id**

Priode analis yang dilakukan adalah sebanyak 5 tahun yaitu dari tahun 2011-2015, sehingga total sampel yang diteliti adalah 25 sampel.

Adapun perusahaan yang memenuhi kreteria sebagai sampel penelitan yaitu:

**Nama Perusahaan Yang Menjadi Objek Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Saham** | **Nama Emiten** | **Tanggal IPO** |
|
| 1 | CTTH | Citatah Tbk | 07/03/1996 |
| 2 | ELSA | Elnusa Tbk | 06/02/2008 |
| 3 | MITI | Citrah Mineral Tbk | 16/07/1997 |
| 4 | PTBA | Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk | 23/12/2002 |
| 5 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk | 12/07/2006 |

*Sumber: www.idx.co.id*

**Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diperoleh, maka hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan pertambangan. Menunjukkan bahwa komite audit mampu meningkatkan kualitas laba perusahaan pertambangan. Komite audit dinilai mampu mengambil keputusan dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang membentuk komite audit melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresional yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit .
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan pertambangan. Hal ini sebabkan bahwa komisris independen belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Karenakan kepemilikan institusional diyakini tidak mampu memonitor tindakan manajer dengan baik bila dibandingkan dengan kepemilikan individual. Disamping itu, adanya tingkat perbedaan populasi dan sampel serta adanya perbedaan waktu observasi. Karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil manajemen laba sehingga kualitas laba semakin meningkat pula.

4. Kepemiilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. Karna kepemilikan manajerial diperusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan, jika dilihat dari hubungannya, maka kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap kualitas laba. Artinya semakin tinggi kepemilikan saham manajerial dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan laba mempunyai kekuatan responsif yang dapat memberikan reaksi positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan pelaku pasar modal pada umumya. Sehingga kepemilikan manajerial mamapu memainkan perannya dalam mekanisme *good corporate governance* yang dinilai mampu untuk mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan.